

# PENINGKATAN FEMALE PEACEKEEPERS INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB

## THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN FEMALE PEACEKEEPERS IN THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING MISSION

Leonard F. Hutabarat <sup>1</sup>

BPPK, Kementerian Luar Negeri RI  
(Lfhutabarat@gmail.com)

**Abstrak** – Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian. PBB telah meminta lebih banyak penggelaran *female peacekeepers* guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini. Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak *female peacekeepers* kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak *female peacekeepers* yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian. Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi *landmark* dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel *female peacekeepers* Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak *female peacekeepers* dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

**Kata Kunci** : Pemelihara perdamaian wanita, gender, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, Indonesia

**Abstract** – As peacekeeping has evolved to encompass a broader humanitarian approach, women personels have become increasingly part of the peacekeeping family. The UN has called for more deployment of female peacekeepers to enhance the overall “holistic” approach to current UN peacekeeping operations. There is clearly more work to be done to integrate more female peacekeepers into UN missions. More skilled and trained female peacekeepers can only be an asset to future peacekeeping operations. In October 2000, the UN Security Council adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security. The resolution was hailed as a landmark resolution in that for the first time, the Security Council recognised the contribution women make during and post-conflict. Since the adoption of Resolution 1325, attention to gender perspectives within the international peace agenda has firmly been placed within the broader peace and security framework. This article explains the development of Indonesian female peacekeepers contribution in the period of 2009-2016 and argues why Indonesia needs to support and to consider deploying more female peacekeepers in UN peacekeeping operations.

**Keywords:** *female peacekeepers, gender, United Nations, peacekeeping, Indonesia*

---

<sup>1</sup> Leonard F. Hutabarat, Ph.D., Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, BPPK, Kementerian Luar Negeri, dan mantan anggota Kontingen Garuda / Konga XXIII - A / UNIFIL dan Indonesian UN Peacekeeper / Blue Helmet yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tahun 2006-2007, serta Veteran Perdamaian (NPV. 08.026.583).

## Pendahuluan

Pada tanggal 8 Maret 2017 ini diperingati sebagai *International Women's Day* dan tahun ini PBB berfokus pada tema “*Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030*”.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, sangat menarik untuk memahami lebih jauh bagaimana peran *female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Operasi pemeliharaan perdamaian PBB telah mengalami evolusi mencakup pendekatan kemanusiaan yang lebih luas,<sup>3</sup> wanita telah semakin meningkat peranannya dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB ini. Peningkatan peran wanita dalam kegiatan *UN peacekeeping* dapat dilihat secara singkat dalam gambar berikut ini<sup>4</sup> :

Gambar 1. Infografis Wanita dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB



Sumber: <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.

Penggelaran wanita di semua bidang –polisi, militer, dan sipil– telah memberikan dampak yang positif bagi kegiatan operasi pemeliharaan perdamaian PBB, baik dalam hal mendukung peran wanita dalam “*building peace*” maupun “*protecting women's rights*”. Dalam semua area pemeliharaan perdamaian, *female peacekeepers* telah membuktikan mereka dapat melaksanakan peran yang sama, *standard* yang sama dan di bawah kondisi sulit yang sama pula, seperti mitra pria. Dalam konteks ini, PBB memiliki suatu “*operational imperative*” dalam merekrut dan mempertahankan keberadaan *female peacekeepers* dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB hingga saat ini.

Sebagai perbandingan statistik, pada tahun 1993, wanita terdiri atas 1% dari “*uniformed personnel*”. Namun, setelah 10 tahun kemudian pada tahun 2014, dari hampir 125.000 *UN peacekeepers*,

<sup>2</sup> Lihat “International Women’s Day 2017”, <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day>,” diunduh pada 27 Juni 2017.

<sup>3</sup> Lihat juga United Nations, *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*, Department of Peacekeeping Operations, New York, 2008, dan *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*, Department of Peacekeeping Operations, New York, 2003.

<sup>4</sup> Lihat “Women in peacekeeping”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml>,” diunduh pada 27 Juni 2017.

wanita mencakup 3% dari *military personnel* dan 10% dari *police personnel* dalam misi UN *peacekeeping*. PBB hingga saat ini mendorong dan menyarankan penggelaran personel wanita dalam “*uniformed functions*”, mengingat tanggungjawab penggelaran personil wanita dalam aspek militer dan polisi ditentukan oleh negara anggota PBB. PBB juga melalui UN *Police Division* telah meluncurkan “*the Global Effort*” untuk merekrut lebih banyak *female police officers* kedalam Kepolisian Nasional dan UN *police operations* di seluruh dunia.<sup>5</sup>

Dalam upaya memperjuangkan “*gender parity*” di antara staf PBB juga merupakan salah satu prioritas dari Sekretaris Jenderal PBB. Pada tahun 2012 di UN *Headquarters*, terdapat 48% staf wanita dan 52% staf pria, dengan disparitas tertinggi pada *mid and senior levels*. Dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB dan *special political missions*, statistik yang ada menunjukkan hanya 29% wanita sebagai staf internasional dan 17% staf nasional.

Statistik ini secara umum tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013, *Departments of Field Support, Peacekeeping Operations and Political Affairs* melakukan suatu proyek “*Bridging the Civilian Gap in Peace Operation*” guna lebih memahami hambatan-hambatan dalam merekrut, mempertahankan dan mendorong *female staff* dalam misi pemeliharaan PBB.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> “Women in peacekeeping”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Laporan tersebut telah dipublikasikan dan rekomendasinya dikembangkan untuk diimplementasikan dari tahun 2014 hingga saat ini. Dengan *civilian field staff* mewakili 53% dari semua UN *Secretariat staff*, peningkatan jumlah *civilian women* dalam *peace operations* akan membantu menuju peningkatan jumlah *female staff* yang bertugas pada PBB secara umum.<sup>7</sup>

Selain itu, *Department of Peacekeeping Operations* (DPKO) juga terus mendorong peningkatan jumlah personel wanita dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Namun, hal ini pada akhirnya sangat tergantung pada negara anggota PBB sebagai kontributor pasukan militer dan polisi untuk menambah jumlah personil wanita dalam *military peacekeeping* atau tidak.

## **Gender dan Peacekeeping**

Wanita dan pria melihat konflik secara berbeda sehingga dengan demikian akan berbeda pula dalam memandang perdamaian. Memahami dan mengintegrasikan perbedaan-perbedaan ini –atau lebih dikenal sebagai *gender perspectives* – kedalam semua aspek dari operasi-operasi perdamaian PBB, menjadi

<sup>7</sup> “Gender Statistics”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml>, diunduh pada 12 Januari 2017.

Kebijakan UN DPKO : “For its part, the Department of Peacekeeping Operations (DPKO) continues to respond to the call in all Women, Peace and Security mandates to increase the numbers of women in peacekeeping by advocating for the deployment of more women. However the ultimate responsibility for getting more women into the military peacekeeping lies with the individual countries that contributing troops and police”.

penting bagi keberhasilan berbagai upaya pemeliharaan perdamaian PBB.

*Department of Peacekeeping Operations* (DPKO) memiliki beberapa upaya dalam meyakinkan bahwa isu-isu gender juga menjadi perhatian utama. Salah satu yang paling penting adalah kebijakan pengarusutamaan gender (*the policy of gender mainstreaming*). Hal ini akan menjamin bahwa gender perspectives akan terintegrasi pada semua elemen kebijakan PBB di semua sektor (*Security Sector Reform*,<sup>8</sup> *Disarmament, Demobilization and Reintegration*,<sup>9</sup> *Police*,<sup>10</sup> *Military*,<sup>11</sup> dan *Elections*<sup>12</sup>) dari perencanaan awal hingga evaluasi. DPKO juga melakukan analisis terhadap dampak pemeliharaan perdamaian bagi kehidupan pria dan wanita dalam situasi-situasi pasca konflik. Dalam konteks menjamin bahwa isu gender ini diarusutamakan dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB, DPKO telah mengeluarkan "*Policy on Gender Equality in Peacekeeping Operations*".<sup>13</sup>

<sup>8</sup> "Security sector reform", <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/security.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.

<sup>9</sup> "Disarmament, Demobilization, and Reintegration", <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/ddr.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.

<sup>10</sup> "UN Police", <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/police.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.

<sup>11</sup> "Military", <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/military/index.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.

<sup>12</sup> "Where we work", <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/recentwork.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.

<sup>13</sup> "Policy : Gender Equality in UN Peacekeeping Operations", [http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/gender\\_directive\\_2010.pdf](http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/gender_directive_2010.pdf), diunduh pada 27 Juni 2017.

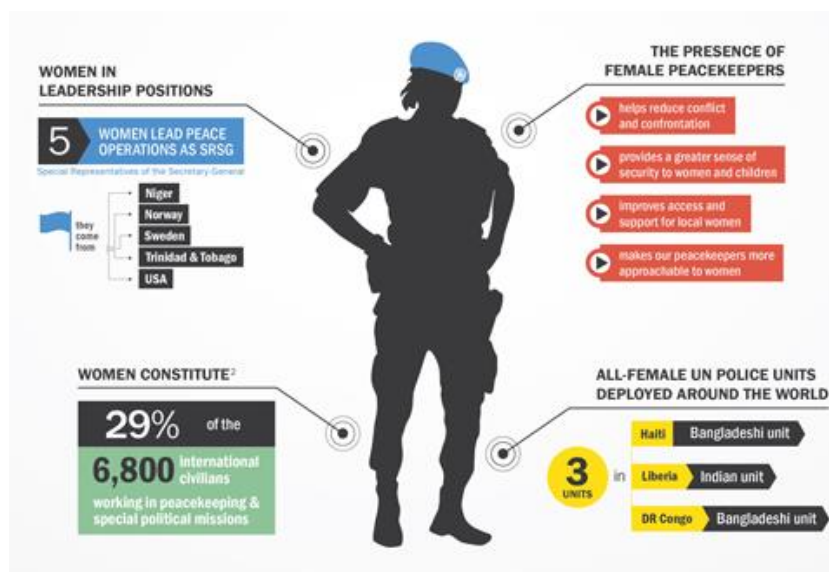
Cetak biru kebijakan gender dan pemeliharaan perdamaian dari *Department of Peacekeeping Operations* (DPKO) didasarkan pada *Security Council Resolution 1325* (2000)<sup>14</sup> yang merupakan Resolusi DK PBB pertama yang membahas dampak konflik bersenjata (*armed conflict*) terhadap wanita. Resolusi tersebut menekankan pentingnya "*women's equal and full participation*" sebagai agen yang aktif dalam pencegahan dan resolusi konflik, bina perdamaian (*peacebuilding*) dan pemeliharaan/penjagaan (*peacekeeping*). Resolusi tersebut menghimbau negara anggota PBB untuk menjamin partisipasi yang sama bagi wanita dan keterlibatan penuh dalam semua upaya dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan, dan mendesak semua aktor dalam meningkatkan partisipasi wanita dan mengintegrasikan perspektif gender dalam semua bidang dari *peace building*. Sebagai tindak lanjut Resolusi DK PBB 1325, DK PBB juga menetapkan Resolusi 1889<sup>15</sup> yang meminta penguatan lebih lanjut terhadap partisipasi wanita pada proses perdamaian dan pengembangan indikator-indikator untuk mengukur *progress* dari Resolusi 1325.

Memahami dampak kekerasan seksual (*sexual violence*) dalam konflik terhadap upaya mempertahankan perdamaian dan keamanan, Dewan Keamanan PBB juga

<sup>14</sup> "Resolution 1889", [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/1325%282000%29](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325%282000%29), 5 October 2009, diunduh pada 27 Juni 2017.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Gambar 2. UN Female Peacekeepers dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB<sup>18</sup>



Sumber: <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml>, diunduh tanggal 12 Januari 2017.

menetapkan Resolusi 1820<sup>16</sup> yang secara eksplisit menghubungkan *sexual violence* sebagai suatu “*tactic of war*” dengan isu “*women peace and security*”. Resolusi DK PBB 1820 memperkuat Resolusi 1325 dan menyatakan bahwa *sexual violence* dalam konflik merupakan suatu kejahatan perang (*war crime*) dan meminta kelompok yang menghadapi konflik bersenjata segera mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi penduduk sipil dari kekerasan seksual, termasuk melatih pasukan dan menegakkan upaya-upaya disiplin.

Lebih lanjut lagi dalam Resolusi 1888,<sup>17</sup> sebagai *follow up* terhadap Resolusi 1820, memberikan mandat bahwa misi *peacekeeping* untuk melindungi wanita dan anak-anak dari kekerasan seksual selama konflik bersenjata, dan meminta Sekjen PBB menunjuk *a special representative on sexual violence during armed conflict* (*Office of the Special*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

*Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict*). Resolusi 1960 ini telah diadopsi dan akan menjadi dasar agenda terhadap “*women, peace and security agenda on sexual violence*”.

Dalam gambar 2 terlihat bagaimana beberapa peranan dari *UN female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian. PBB telah meminta lebih banyak penggelaran *female peacekeepers* guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini. Banyak yang

<sup>18</sup> “Women in peacekeeping”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml>, diunduh pada 12 Januari 2017.

harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak *female peacekeepers* kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak *female peacekeepers* yang terlatih akan menjadi asset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.

### **Signifikansi UN Female Peacekeepers**

*Female peacekeepers* bertindak sebagai *role models* pada lingkungan setempat, menginspirasi wanita dan anak perempuan dalam masyarakat yang sering didominasi pria untuk mendorong hak-haknya dan partisipasi dalam proses perdamaian. Peningkatan rekrutmen wanita sebagai *UN peacekeepers* dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB penting untuk:

- Memberdayakan wanita di *host community*;
- Menangani kebutuhan-kebutuhan khusus dari *female ex-combatants* selama proses demobilisasi dan integrasi kembali ke dalam kehidupan sipil;
- Membantu agar *peacekeeping force* dapat dijangkau oleh wanita dalam komunitas;
- Melakukan wawancara kepada *survivors of gender-based violence*;
- Mentoring *female cadets* pada akademi militer dan kepolisian;
- Melakukan interaksi dengan wanita dalam masyarakat dimana wanita dilarang berkomunikasi dengan pria.

Selain berbagai hal di atas, kehadiran *female peacekeepers* dapat juga:

- Membantu mengurangi konflik dan konfrontasi;
- Meningkatkan akses dan dukungan bagi wanita setempat;
- Menjadi *role models* bagi wanita dalam masyarakat;
- Memberikan rasa aman yang lebih besar bagi penduduk setempat, termasuk wanita dan anak-anak;
- Memperluas keahlian dalam suatu *peacekeeping mission*.

Mengapa PBB memerlukan lebih banyak *UN female peacekeepers*? Peristiwa bersejarah dalam *UN peacekeeping* terjadi pada tanggal 12 May 2014, pada saat Mayor Jenderal Kristin Lund dari Norwegia sebagai wanita pertama ditunjuk menjadi *UN Force Commander in a United Nations peacekeeping operation — UN Peacekeeping Force in Cyprus*.<sup>19</sup> Mayjen Lund memiliki prestasi dalam 34 tahun karier militernya pada tingkat nasional dan internasional. Tahun 1991, bertugas dalam *Operation Desert Storm to Saudi Arabia*, dan kemudian di Afghanistan pada *North Atlantic Treaty Organization's International Security Assistance Force Headquarters*. Tahun 2009, dipromosikan sebagai Mayor Jenderal dan *Chief of Staff of the Norwegian Home Guard* — perwira wanita pertama dipromosikan pada

<sup>19</sup> Lihat Alexandra Ivanovic, "Why the United Nations Needs More Female Peacekeepers", dalam <http://unu.edu/publications/articles/why-un-needs-more-female-peacekeepers.html>, diunduh pada 12 Januari 2017.

posisi tersebut. Pengalamannya di PBB termasuk bertugas di *UN Interim Force in Lebanon* dan *UN Protection Force in the Former Yugoslavia*.

Penunjukkan Mayjen Lund adalah pengakuan pertama dari implementasi *UN Security Council Resolution 1325* tahun 2000<sup>20</sup> mengenai “*women, peace and security*”. Resolusi tersebut merupakan pergeseran dalam kebijakan PBB untuk melibatkan wanita lebih banyak dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB di dunia. Hal ini juga menunjukkan afirmasi terhadap peranan wanita dalam pencegahan dan resolusi konflik, negosiasi, pemeliharaan perdamaian, respons kemanusiaan dan rekonstruksi pasca konflik. Lebih lanjut lagi, hal tersebut juga memerlukan integrasi perspektif gender dalam berbagai area tersebut, termasuk operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.

Menurut Herve Ladsous, mantan *Head of UN Peacekeeping*: “*Women can and must play a leading role in political participation, conflict resolution and the transition from conflict to peace*”.<sup>21</sup> Peranan wanita dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB tidak hanya dalam aspek polisi, militer dan sipil, namun wanita juga berperan lebih

<sup>20</sup> “Landmark resolution on Women, Peace and Security”, <http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/>, diunduh pada 12 Januari 2017.

<sup>21</sup> “Security Council Open Debate on Women, Peace and Security (Sexual Violence)”, 23rd of February 2012, Security Council Chamber Statement by Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, Hervé Ladsous, to the United Nations”, [http://www.peacewomen.org/sites/default/files/dpko\\_wps\\_2012\\_o.pdf](http://www.peacewomen.org/sites/default/files/dpko_wps_2012_o.pdf), diunduh pada 27 Juni 2017.

besar dalam *UN peacekeeping operations* dibandingkan pada masa lalu.

Meskipun demikian, dalam aspek *gender equality* dalam *peacekeeping missions*, masih terdapat beberapa hal, yaitu:

- Kurangnya pemahaman di antara negara anggota PBB mengenai Resolusi 1325 dan kebijakan PBB mengenai *gender equality* dalam operasi perdamaian PBB;
- Kesenjangan data dan analisis mengenai partisipasi wanita dalam institusi keamanan nasional secara global, khususnya dalam *UN peacekeeping*; dan
- Masih adanya norma sosial dan bias yang menyebabkan masih adanya *gender inequality* dalam sektor keamanan.

Debat mengenai *female soldiers* seringkali lebih pada peran mereka dalam “*combat*” daripada difokuskan pada bagaimana secara baik menggunakan kekuatan *female officers* dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian. Terdapat peran khusus yang sesuai dengan “*female officers*” dibandingkan “*male counterparts*”. Bahkan Mayjen Lund menyatakan bahwa salah satu keuntungan penting dari *female peacekeepers* adalah dalam penugasannya di Afghanistan, dapat mengakses 100% populasi, tidak hanya 50%. Akses kepada penduduk setempat menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks konflik dimana *UN peacekeepers* ditugaskan.

Keperluan menjalin komunikasi dengan penduduk setempat sangat vital – tidak hanya untuk pengumpulan intelijen, namun juga untuk implementasi “*early warning systems, conduct capacity building and build trust*”. Namun, mengingat wanita dan anak-anak adalah korban utama dari kekerasan dalam konflik, khususnya kekerasan seksual, seringkali sulit bagi “*male soldiers*” mengatasi “*social and cultural boundaries*” yang diperlukan guna membangun “*trust*” tersebut. Hal ini yang menyebabkan “*female peacekeepers*” dapat mengisi gap dengan memberikan wanita dan anak-anak perasaan aman yang lebih besar, namun juga dapat memperkuat “*trust*” mereka dalam proses mengumpulkan informasi yang berharga untuk kepentingan misi.

Studi yang dilakukan PBB dalam mendukung Resolusi 1325, dari pengalaman di Kamboja, Kosovo, Afghanistan, Liberia dan DRC, menunjukkan bahwa “*female soldiers*” tidak mengalami “*cultural restrictions*” yang sama dengan “*male counterparts*”, dan dapat memperoleh informasi dari wanita dan anak-anak. Kemampuan untuk memperoleh kepercayaan dari penduduk setempat seharusnya dipertimbangkan sebagai komponen yang vital dari operasi pemeliharaan perdamaian apapun.

### **Indonesia dan UN Female Peacekeepers**

Laura Neack mengidentifikasi dua perspektif berbeda yang menjelaskan mengapa negara berpartisipasi dalam UN

*peacekeeping*. Pada satu sisi, perspektif “*idealis*” berasumsi bahwa “*states will participate in UN peacekeeping out of an obligation to protect international peace and preserve international norms and values*”. Pencapaian norma dan nilai tersebut akan menyebabkan negara berpartisipasi dalam *peacekeeping*. Disisi lain, penjelasan “*realis*” menyatakan bahwa “*states do whatever they can, given their power resources, to protect and preserve their national interests*”.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan ini, partisipasi dalam *peacekeeping* dipahami utamanya sebagai suatu instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Lebih lanjut, Catherine Gegout juga menegaskan bahwa dalam perspektif realis, “*national interests are not only defined in terms of “hard” military-security issues, but also in terms of economic interests and even states’ prestige. Hence, realists simply “expect government-defined national interest to take precedence over altruistic humanitarianism*”.<sup>23</sup>

Sejumlah analisis mendasarkan diri pada interpretasi realis untuk menjelaskan keterlibatan negara seperti India, RRT dan negara-negara Eropa dalam operasi perdamaian. Perbedaan tujuan kebijakan luar negeri biasanya juga berhubungan dengan partisipasinya. Dalam perspektif militer, tujuan-tujuan tersebut sering diasosiasikan antara

<sup>22</sup> Laura Neack, “UN Peace-keeping : In the Interest of Community or Self ?”, dalam *Journal of Peace Research*, Vol. 32, No. 2, 1995.

<sup>23</sup> Catherine Gegout, “The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of Congo (1996-2006)”, *International Peacekeeping*, Vol. 16, No. 2, 2009.



lain dengan “*guaranteeing states’s own security, testing operational aspects of military doctrines and strategies, forming and instructing national contingents, and guaranteeing their state of preparedness at comparatively low cost*”.<sup>24</sup> Sementara dengan perspektif politis, keterlibatan dalam *peace operations* biasanya berkaitan dengan “*increasing states’ international profile, acquiring prestige, interests in their perspective areas of influence or interest, creating or strengthening a status of leadership, fostering opportunities for integration in to the international community, and creating opportunities for regional / international cooperation - including military aspects*”.<sup>25</sup>

Apakah eksplisit atau tidak, kebijakan luar negeri Indonesia juga mengadopsi perspektif realis untuk menjelaskan partisipasi Indonesia pada UN *peacekeeping*. Pemerintah Indonesia mengadopsi partisipasi dalam *peace operations* sebagai bagian dari strategi integrasi kepada sistem internasional.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> W.J.M van Genugten, C. Homan, N.J. Schrijver, P.J.I.M de Waart, “Peace-Keeping and Peace-Enforcing Operations”, dalam *The United Nations of the Future Globalization with A Human Face*, (Amsterdam : KIT Publishers, 2006).

<sup>25</sup> Lihat Bates Gill & Chin-Hao Hung, “China’s Expanding Role in Peacekeeping : Prospects and Policy Implication”, *SIPRI Policy Paper*, Vol. 25, 2009; David S. Sorenson & Pia Christina Wood, eds, *The Politics of Peacekeeping in the Post-Cold War Era*, (London : Frank Cass, 2005); Krishnasamy Kabilan, “Recognition for Third World Peacekeepers : India and Pakistan”, *International Peacekeeping*, Vol. 8, No. 4, 2001; Alan Bullion, “India and UN Peacekeeping Operations”, *International Peacekeeping*, Vol. 4, No. 1, 1997; dan Catherine Gegout, “The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of Congo (1996-2006)”, *International Peacekeeping*, Vol. 16, No. 2, 2009.

<sup>26</sup> Leonard F. Hutabarat, “Indonesian Participation

Semua situasi dimana partisipasi militer Indonesia dalam UN *peacekeeping* disebutkan terjadi dalam konteks “*the effectiveness of the use of military expression as an instrument of Indonesian foreign policy*”. Dengan demikian, hal ini merefleksikan interpretasi realis bahwa “*peacekeeping operations should be regarded as an operational category of great utility for Indonesian foreign policy*”.<sup>27</sup>

Partisipasi Indonesia dalam banyak misi UN *peacekeeping* juga didukung perspektif realis yang sama bahwa hal itu akan diasosiasikan dengan “*the quest for a non permanent seat at the UN Security Council / UNSC (2019-2020)*”. Pandangan lainnya adalah penggunaan *peacekeeping* dengan kekuatan militer bagi kebijakan luar negeri Indonesia, dimana partisipasi dalam operasi perdamaian tersebut akan meningkatkan “*international bargaining power of Indonesia*”, yang memberikan kontribusi meningkatnya “*soft power*” dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan sumber daya yang diperuntukkan pada sektor pertahanan.

Keberadaan dan partisipasi Pasukan Garuda Indonesia dalam 60 tahun misi perdamaian PBB menunjukkan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari mandat konstitusi dan diplomasi dalam bidang tersebut akan tetap terus

in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities”, *Global & Strategis*, Tahun 8, No. 2, Juli-Desember 2014.

<sup>27</sup> Lihat Leonard Hutabarat, “Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB”, *Kompas*, 15 September 2008.

dilanjutkan.<sup>28</sup> Penyusunan *roadmap* terhadap *Vision 4.000 Peacekeepers* akan menjadi rujukan strategis bagi kementerian / lembaga terkait guna mendukung terwujudnya visi dimaksud. Hal ini juga telah jelas dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2015.

Sejak Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-A / UNIFIL ke Lebanon tahun 2006, Indonesia telah masuk dalam 20 besar negara kontributor Pasukan PBB dengan jumlah 1.069 personil akhir Desember 2007 dari 121 negara kontributor. Indonesia juga telah berhasil menempatkan Mayjen Imam Edy Mulyono, sebagai *Force Commander of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO). Selain itu, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, juga pernah bertugas sebagai Panglima Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Timur Tengah, yaitu Panglima *United Nations Emergency Force* (UNEF) II tahun 1976-1979. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuknya sebagai Panglima UNEF II tahun 1976 untuk memimpin pasukan gabungan beranggotakan 4.031 personel dari Australia, Austria, Kanada, Finlandia, Ghana, Indonesia, Irlandia, Nepal, Panama, Peru, Polandia, Senegal dan Swedia. Pasukan PBB ini berhasil mengamankan jalan menuju perundingan damai antara Mesir dan Israel yang berperang.

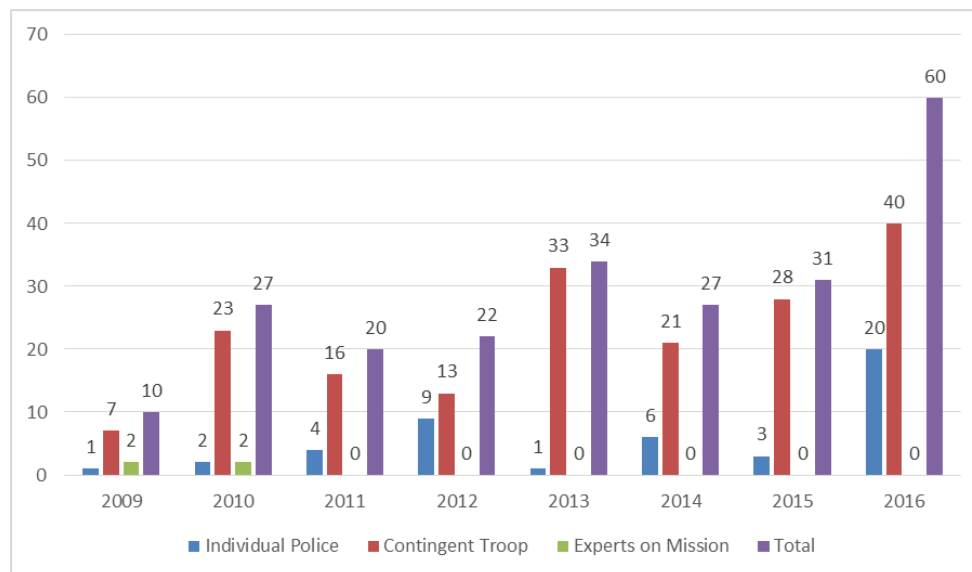
Saat ini, partisipasi Indonesia dalam UN *peacekeeping operation* telah memasuki babak baru. *Pertama*, untuk

<sup>28</sup> Indonesia telah terlibat dalam operasi penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957. Lihat juga Leonard Hutabarat, "Indonesia dan Penjaga Perdamaian PBB", *Pikiran Rakyat*, 22 Mei 2015.

pertama kali dalam sejarah *peacekeeping operation*, Indonesia memberikan kontribusi kapal laut sebagai bagian dari UNIFIL *Maritime Task Force* (MTF). *Kedua*, untuk pertama kalinya Indonesia berpartisipasi dalam UN *peace mission* di Amerika, yaitu *UN Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH). Sebelumnya, Asia dan Afrika, Eropa, menjadi area penggelaran tradisional dari Kontingen Garuda. Saat ini, dengan kontribusi militer dan polisi di MINUSTAH, dunia menjadi area penggelaran Kontingen Garuda.

*Peacekeeping operation* akan berlanjut menjadi instrumen yang penting bagi kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia aktif memberikan kontribusi pengembangan konsep strategis penggelaran UN *peacekeeping mission*. Indonesia senantiasa mendorong peningkatan peran sipil (*White Helmets*) guna mendukung program pembangunan dan rehabilitasi di kawasan pasca konflik. Indonesia akan berupaya menjadi *hub of a network of peacekeeping centers* di kawasan. Indonesia menggelar *peacekeepers* dalam misi PBB untuk memenuhi komitmennya menjaga perdamaian dunia. Komitmen Indonesia dalam pembentukan *International Peace and Security Center* (IPSC) di Sentul, hingga pengiriman kapal laut dan satgas helikopter UNIFIL di Lebanon dan Darfur di Sudan, merupakan beberapa upaya optimalisasi peran Indonesia dalam UN *peacekeeping*. Indonesia tetap berkomitmen melanjutkan upayanya meningkatkan kontribusi dan menuju *Vision 4.000 Peacekeepers* Indonesia

**Gambar 3.** Indonesian UN Female Peacekeepers, 2009 – 2016



Sumber: UNDPKO as of 31 December 2016, diolah penulis.

sampai tahun 2019 untuk menjadi *the top ten largest contributor countries of the UN troops*.<sup>29</sup>

Sejauh ini Indonesia juga berkomitmen mengirimkan *UN female peacekeepers* dalam berbagai misi PBB sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini. Tahun 2016 merupakan puncak pengiriman personil wanita terbesar Indonesia sejak tahun 2009-2016, dimana personil wanita banyak dikirimkan dalam misi UNIFIL di Lebanon hingga Desember 2016. Dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri RI

<sup>29</sup> Pernyataan Pers Tahun 2015, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, Januari 2015. Sementara dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri RI Tahun 2017 disampaikan upaya untuk mewujudkan *Vision 4000 Peacekeepers* tahun 2019, termasuk melalui pengiriman satu batalyon komposit berkekuatan 800 personel; 100 *Individual Police Officers* (IPOs) termasuk 40 Polisi Wanita, serta satu *satgas Formed Police Unit* (FPU) berkekuatan 140 anggota Polri, “Pernyataan Pers Tahunan menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi tahun 2017”, <http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Documents/PPTM-2017-ID.pdf>, diunduh pada 27 Juni 2017.

Tahun 2017 komitmen untuk pengiriman personil wanita dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB untuk tahun 2017 juga telah ditegaskan kembali (lihat gambar 3).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan anggota PBB berkomitmen seperti pada tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB, khususnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Partisipasi Indonesia pada *UN peacekeeping operation* berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945, UU Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta *UN Charter*. Sejarah pasukan penjaga perdamaian Indonesia / Pasukan Garuda (Kontingen Garuda / Konga) dimulai dengan pengiriman misi pertamanya (Garuda I) pada tahun 1957 ke Mesir

(UNEF) di Timur Tengah.

Kontingen Garuda yang bertugas di bawah bendera PBB, yang dikenal dengan sebutan “*Blue Helmet / Blue Beret*” di seluruh dunia, sekaligus menandai 60 tahun kontribusi Indonesia dalam UN *peacekeeping* sejak tahun 1957. Partisipasi Indonesia dalam misi-misi UN PKO sejak awal telah memperoleh pujian tinggi dari banyak negara atas profesionalisme dan kontribusinya bagi misi-misi PBB. Misi-misi pasukan penjaga perdamaian PBB saat ini menjadi salah satu instrumen utama dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia.

Peningkatan kontribusi Indonesia pada UN PKO tidak hanya dalam hal jumlah personel, namun juga dalam “*performance unit*”. Indonesia telah mengirimkan kapal lautnya, yaitu KRI Diponegoro sejak 2009 untuk bergabung dengan *Maritime Task Force (MTF) of the UNIFIL* di Lebanon. Beberapa posisi *high ranking officials* di UNIFIL juga telah dipercayakan kepada Indonesia, yaitu *Chief of Staff of the Maritime Task Force (MTF)* dan *Deputy Commander Sector East* di UNIFIL. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam UN PKO di kawasan Amerika, yaitu pada *UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)*, yang menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kebijakan luar negerinya. Sebelumnya, Asia, Afrika, dan Eropa, telah menjadi area penggelaran tradisional dari Kontingen Garuda. Saat ini, kontribusi personil militer dan polisi Indonesia pada MINUSTAH, telah menjadikan dunia sebagai area penggelaran Kontingen Garuda.

Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) tanggal 15 Desember 2011,<sup>30</sup> juga menunjukkan visi Indonesia untuk mengembangkan peran dan partisipasinya secara signifikan pada *peacekeeping operation* khususnya dalam memperkuat peran 3 (tiga) komponen PKO, yaitu kekuatan militer, polisi, dan sipil. Untuk peran militer, *leading sector* untuk pengembangannya adalah Mabes TNI dengan PMPP, dan komponen polisi dilaksanakan oleh Mabes Polri. Sementara untuk keterlibatan *civilian experts* – saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri – dimana hal ini sejalan dengan misi-misi PBB, dengan *peacekeeping operation* yang bersifat multidimensi dan *rapid deployment standard and on-call civilian experts* menjadi lebih signifikan.

### **Evaluasi Penggelaran Indonesian Female Peacekeepers dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB**

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 masih merupakan kerangka pedoman kebijakan bagi Kementerian Pertahanan dalam kebijakan pertahanan Indonesia, dimana terdapat salah satu kepentingan strategis pertahanan, termasuk stabilitas regional dan perdamaian dunia.<sup>31</sup> Kerjasama pertahanan juga memasukkan tugas TNI dalam *peacekeeping operation*. Struktur Buku Putih Pertahanan merujuk

<sup>30</sup> Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP).

<sup>31</sup> “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015”, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>, diunduh pada 27 Juni 2017.

pada konsitusi dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Buku Putih Pertahanan dalam Bab 6 menyebutkan berkaitan dengan kerjasama internasional di bidang pertahanan, TNI akan memenuhi tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam misi *international peacekeeping*. Pengiriman personel TNI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang diharapkan akan mencapai 4.000 orang pada tahun 2019. Sampai dengan saat ini, personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian terdiri atas beberapa macam penugasan, yaitu pasukan militer, pengamat militer, dan staf militer. Indonesia juga mengirim beberapa Alutsista TNI seperti kapal perang (KRI) yang tergabung dalam *Maritime Task Force* (MTF) misi UNIFIL Lebanon dan pengiriman pesawat heli MI-17 yang bertugas di misi MINUSMA Mali.

Penggelaran *Indonesian female peacekeepers* dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB adalah suatu keniscayaan pada masa-masa yang akan datang. Hal ini bukan hanya disebabkan telah adanya kebijakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) oleh PBB, namun juga akan lebih menunjukkan *role models* wanita Indonesia sebagai *UN peacekeepers* di area penggelaran misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sejauh ini misalnya, dalam hal kontribusi personel wanita Indonesia di *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), telah banyak membantu interaksi dengan wanita dan anak-anak di mana dalam masyarakat yang didominasi Syiah di

Lebanon Selatan, wanita dilarang banyak berkomunikasi dengan pria. Selain itu, kontribusi Indonesia tersebut juga membantu Batalyon Mekanis Indonesia (Indobatt) dalam menjangkau wanita dan anak-anak secara lebih luas di komunitas, baik dalam berbagai kegiatan pelayanan medis maupun kegiatan CIMIC lainnya. Tantangan ke depan tidak hanya bagaimana upaya meningkatkan kebijakan Pemerintah RI dalam lebih meningkatkan jumlah kontribusi *Indonesian female peacekeepers* dan membekali berbagai keahlian yang lebih khusus dan spesifik dalam mendukung *UN peacekeeping mission* yang semakin bersifat multidimensi. Selain itu, ke depannya juga perlu dipertimbangkan lebih mengintegrasikan perspektif gender dalam doktrin TNI dalam konteks penggelaran misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya terdapat dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia pada masa depan, namun juga kebijakan Pemerintah RI dalam lebih banyak mengikutsertakan wanita Indonesia dalam berbagai operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal ini tidak hanya dalam aspek personel polisi, militer maupun sipil, yang sejalan dengan prinsip *gender equality* dalam Resolusi 1325.

Terdapat beberapa peluang yang mendukung partisipasi Indonesia dalam misi *UN peacekeeping*, seperti: peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam beberapa fora internasional dan isu-isu penting; posisi Indonesia padatop *20 troops contributing countries* dalam UN

PKO; meningkatnya akseptibilitas negara-negara lain terhadap UN *peacekeeping troops* Indonesia; pengalaman Indonesia dalam misi UN *peacekeeping*; pembentukan *International Peace and Security Center* sebagai “*network hub*” bagi UN *peacekeeping center* lainnya di kawasan; kapabilitas Indonesia dalam menyediakan “*enablers and multipliers*” dalam UN *peacekeeping missions* dengan memberikan kontribusi yang lebih *transport helicopters, naval ship in maritime task force, dan engineering units*; kontribusi yang lebih banyak bagi *female peacekeepers* Indonesia, terutama polisi wanita dalam UN PKO; dan kapabilitas industri pertahanan nasional seperti PT. Pindad (Persero) dalam manufaktur *Armoured Personnel Carrier (Anoa 6x6 APC)* yang dapat digunakan UN *mechanized infantry battalion* dalam misi UN *peacekeeping* sebagai bagian dari mengembangkan industri nasional yang strategis.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, terdapat juga tantangan berkenaan dengan upaya penggelaran UN *female peacekeepers* Indonesia dalam misi UN *peacekeeping*, antara lain : belum masuknya upaya perhatian terhadap penggelaran *Indonesian UN female peacekeepers* secara

---

<sup>32</sup> Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB dapat juga dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Salah satu produk Indonesia yang digunakan dalam misi pemeliharaan perdamaian adalah kendaraan militer lapis baja (ANOA) yang diproduksi oleh PT. Pindad (Persero). Jenis-jenis kendaraan ini dapat dilihat pada website PT. Pindad (Persero), “Kendaraan Khusus”, <https://www.pindad.com/special-vehicles>, diunduh pada 27 Juni 2017.

khusus dalam Buku Putih Pertahanan maupun adanya *White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission* secara khusus; serta terbatasnya dukungan untuk menggelar *women peacekeepers* dalam misi UN PKO, termasuk belum menjadi perhatian khusus dalam Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019*).<sup>33</sup>

## Kesimpulan

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan alinea IV Pembukaan UUD Tahun 1945 senantiasa diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia didalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN *Peacekeeping Operations / UN PKO*). Presiden RI Joko Widodo juga telah menetapkan salah satu agenda aksi untuk meningkatkan peran global Indonesia, termasuk melalui peran aktif dalam penyelesaian konflik (*conflict resolution*), penjagaan/ pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*), dan bina perdamaian (*peacebuilding*).

Dalam satu dekade terakhir ini, partisipasi Indonesia pada UN *peacekeeping* semakin meningkat. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam *peace operations* dapat memenuhi kepentingan nasional.

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019*).

Indonesia juga “*bid for a non permanent seat on UN Security Council / UNSC (2019-2020)*”. Berdasarkan hal-hal tersebut dan mengingat status Indonesia saat ini sebagai “*emerging power/economies*”, mempertahankan posisi yang konsisten dalam keamanan internasional dapat berdampak positif terhadap “*Indonesia’s emergence*”. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah RI mulai dari pembentukan PMPP, komitmen Presiden Indonesia untuk meningkatkan jumlah personil Indonesia dalam UN PKO, pembentukan *International Peacekeeping Center* di Sentul, Bogor, hingga pengiriman kapal laut dan satgas helikopter UNIFIL di Lebanon dan Darfur di Sudan. Hal-hal tersebut merupakan optimalisasi peran Indonesia dalam UN PKO.<sup>34</sup>

Dengan komitmen militer yang besar dalam misi-misi *peacekeeping*, Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan *review* terhadap Buku Putih Pertahanan Indonesia dengan mempertimbangkan peran *Indonesian UN female peacekeepers* di masa depan. PBB telah menghimbau lebih banyak penggelaran *UN female peacekeepers* guna memperkuat pendekatan yang “*holistic*” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini. Diperlukan adanya upaya yang lebih terintegrasi untuk melibatkan lebih banyak lagi *female peacekeepers* kedalam misi-misi PBB. *UN Female peacekeepers* yang terlatih akan menjadi aset bagi masa

<sup>34</sup> Lihat juga David Capie, “Indonesia as an Emerging Peacekeeping Power : Norm Revisionist or Pragmatic Provider ?”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 38, No. 1, 2016.

depan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Setidaknya dengan telah adanya penunjukkan wanita yang pertama kali menjadi *UN Force Commander* tahun 2014, generasi baru wanita *peacekeepers* PBB akan terinspirasi dalam menghadapi tanggungjawab yang semakin menantang dalam peran *UN peacekeeping* di dunia, termasuk dari Indonesia.

Hal tersebut akan menjadi sebuah perjalanan bersejarah bagi Indonesia untuk dekade-dekade berikutnya. Pemerintah Indonesia kiranya perlu menetapkan kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia pada misi *UN peacekeeping* sebagai bagian dari instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang memerlukan pendekatan yang strategis dan holistik, termasuk upaya mengikutsertakan *Indonesian UN female peacekeepers*. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan *gender mainstreaming* PBB dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menjadi 10 besar kontributor Pasukan Penjaga Perdamaian PBB akan menjadi sebuah perjalanan bersejarah bagi Indonesia untuk dekade-dekade berikutnya. “*The Peacekeeping Forces are recruited from among the young people of many nations, who, in keeping with their ideals, voluntarily take on a demanding and hazardous service in the cause of peace*”.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon saat *UN Peacekeepers Day* Tahun 2014.

## Daftar Pustaka

### Buku

Genugten, W.J.M. van, C. Homan, N.J. Schrijver, P.J.I.M de Waart. 2006. "Peace-Keeping and Peace-Enforcing Operations" in *The United Nations of the Future Globalization with A Human Face*. Amsterdam : KIT Publishers.

Hutabarat, Leonard F., H. Abdul Mun'im Ritonga, M. Zaim A. Nasution (Tim Deplu), 2007. *Tinjauan mengenai Perkembangan Konflik Lebanon - Israel dan Peranan Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL)*. Jakarta : PT. Saba Widya Persada.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Sorenson, David S., and Pia Christina Wood, eds. 2005. *The Politics of Peacekeeping in the Post-Cold War Era*. London : Frank Cass.

United Nations. 2008. *United Nations Peacekeeping Operations : Principles and Guidelines*. New York : Department of Peacekeeping Operations.

\_\_\_\_\_, 2003. *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*. New York : Department of Peacekeeping Operations.

### Jurnal

Bullion, Alan. 1997. "India and UN Peacekeeping Operations". *International Peacekeeping*. Vol. 4. No. 1.

Capie, David. 2016. "Indonesia as an Emerging Peacekeeping Power : Norm Revisionist or Pragmatic Provider?". *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 38. No. 1.

Gegout, Catherine. 2009. "The West, Realism and Intervention in the Democratic Republic of Congo (1996-2006)". *International Peacekeeping*. Vol. 16, No. 2.

Gill, Bates, dan Chin-Hao Huang. 2009. "China's Expanding Role in Peacekeeping :

Prospects and Policy Implication". *SIPRI Policy Paper*. Vol. 25.

Hutabarat, Leonard F. 2016. "Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 6. No. 2. Agustus.

\_\_\_\_\_, 2014. "Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities". *Global & Strategis*. Tahun 8. No. 2. Juli-Desember 2014.

Krishnasamy, Kabilan. 2001. "Recognition for Third World Peacekeepers : India and Pakistan". *International Peacekeeping*. Vol. 8. No. 4.

Neack, Laura. 1995. "UN Peace-keeping : In the Interest of Community or Self ?". *Journal of Peace Research*. Vol. 32. No. 2.

### Undang-Undang / Peraturan

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP).

Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019*).

### Surat Kabar

Hutabarat, Leonard. 2015. "Indonesia dan Penjaga Perdamaian PBB", *Harian Pikiran Rakyat*, 22 Mei.

\_\_\_\_\_. 2008. "Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB", *Harian Kompas*, 15 September.



## Website

- “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015”, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Disarmament, Demobilization, and Reintegration”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/ddr.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Gender Statistics”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml>, diunduh pada 12 Januari 2017.
- Ivanovic, Alexandra, “Why the United Nations Needs More Female Peacekeepers”, dalam <http://unu.edu/publications/articles/why-un-needs-more-female-peacekeepers.html>, diunduh pada 12 Januari 2017.
- ”International Women’s Day 2017”, <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Kendaraan Khusus”, <https://www.pindad.com/special-vehicles>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Landmark resolution on Women, Peace and Security”, <http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/>, diunduh pada 12 Januari 2017.
- “Military”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/military/index.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Policy : Gender Equality in UN Peacekeeping Operations”, [http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/gender\\_directive\\_2010.pdf](http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/gender_directive_2010.pdf), diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Pernyataan Pers Tahunan menteri Luar Negeri Republik Indonesiaretno L.P. Marsuditahun 2017”, <http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Documents/PPTM-2017-ID.pdf>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Resolution 1889 (2009), 5 October 2009”, [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/1889%282009%29](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1889%282009%29), diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Security Council Open Debate on Women, Peace and Security (Sexual Violence), 23rd of February 2012, Security Council Chamber Statement by Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, Hervé Ladsous, to the United Nations”, [http://www.peacewomen.org/sites/default/files/dpko\\_wps\\_2012\\_o.pdf](http://www.peacewomen.org/sites/default/files/dpko_wps_2012_o.pdf), diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Security sector reform”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/security.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “UN Police”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/police.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Women in peacekeeping”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.
- “Where we work”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/recentwork.shtml>, diunduh pada 27 Juni 2017.

